

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumamastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian* (S. Firatun Annisya, SE. & Sukarno, S.IP. (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- F. D. Agnia, & D. A. W. Syaroni. (2023). Evaluasi Manajemen Data Operational pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menggunakan DMBOK dan CMMI. *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi*, 9(2), 76–78. <https://doi.org/10.34010/jtk3ti.v9i2.11318>
- Aini, R. N. (2025). Digitalisasi Program PKH : Studi DTSEN di Kecamatan Sinjai Utara. *IO(2)*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i2.28816>
- Amrozi, Y., Aini, N., & Munadhiroh, Z. (2022). Peta Perkembangan E-Gov di Indonesia. *JSI : Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 14(1), 2465–2472.
- Anderson, J. E. (2022). *Public Policymaking* (9th Editio). Cengage Learning.
- Andi Sri Yusnani Yasin, Andi Anwar, Unim W Sagena, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 366–373. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>
- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 129–147. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11255>
- Astri Dwi S, Sri Indarti, E. K. Novliza (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(1).
- Bappenas. (2025). Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional: Solusi Perencanaan Pembangunan Yang Lebih Tepat Sasaran. Berita Utama.
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4, 97–102.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge (Taylor & Francis Group).
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fathony, R., Muradi, M., & Sagita, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5581>
- Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian Government's Digital

- Transformation. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(5), 1128–1141. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2868>
- Heryana, A. (2018). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul.
- Hupe, M. H. & P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (3rd Editio). SAGE Publications Ltd.
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). *Populasi dan Sampling (Kuantitatif) , Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis*. 7, 26320–26332.
- Jumadi. (2025). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal Untuk Otonomi Daerah Yang Efektif. *Jurnal Ijtihad*, 2.
- Mahtiasari, A., Mardiyono, M., & Amiruddin, A. (2019). Analisis Kapasitas Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(7), 384–392.
- Manoppo, E. V., Laoh, N. A., (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Rs-Rtlh Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara . 4(April), 25–39.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Editio). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya,.
- Novliza Eka Patrisia , Faizal Anwar, A. D. S. (2021). Penerapan Transformasi Digital Pada Pelayanan Publik Di Badan Pengelola Keuangan Provinsi Bengkulu. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(1).
- Permana, D. (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. *International Journal Publishing INFLUENCE: International Journal of Science Review*, 5(3), 2023.
- Pratama, R. A., Pratama, H. O., Gustiana, I., Saputra, A., & Nasor, M. (2025). *Analisis Kebijakan Dalam Kepemerintahan Daerah*. 04(08), 120–130.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.
- Rachmawati, I. N. (2007). *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: 11*,

35–40. <https://doi.org/10.7454/JKI.V11111.184>

- Rahman, T. A., Idami, Z., & Alqarni, W. (2023). Analisis Policy Capacity Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 8(2), 1–13. www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip
- Rahmawati, D. (2023). Tata Kelola Data Sosial Berbasis Teknologi Informasi dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Urnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 9, No, 101–115.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rani, B. M. (2024). Peran Kebijakan Publik dalam Mendorong Inovasi Teknologi: Perspektif Pelaku Industri dan Pemerintah. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(2), 80–84.
- S, E. (2025). *Data Bansos Tidak Lagi Gunakan DTKS, Pemerintah Beralih ke DTSEN*. Harian Bengkulu.
- Salsabila, D., Jatnika, D. C., Firsanty, F. P., & Sosial, K. (2025). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Layanan Sosial Di Indonesia : Tinjauan Sistematis *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Program sosial dan pelayanan kepada masyarakat memainkan peran krusial dalam peningkatan kesejahteraan da*. 8(1), 50–59. <https://doi.org/10.24198/focus.v8i1.63672>
- Setyanto, W. (2025). Data Tunggal Sosial Ekonomi , Penurunan Kemiskinan , Dan Pembangunan Berkelanjutan : Pengalaman Indonesia. 266–283.
- Setyawan, Y., Erliyana, A., Makarim, E., Sjarif, F. A., Dewi, L. R., & Sukma, A. N. A. (2025). Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 21(1), 155–179. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.68556>
- Siregar, S. D. P., & Nasution, M. I. P. (2025). Peran Data Integration Dalam Mewujudkan Interoperabilitas Sistem Informasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 02(12), 555–560.
- Sius, K. T., Peten, Y. Y. P., Raju, K. V., Kaha, H. L., Nyong, F., & Yani, A. (2024). Public Trust : Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan TNP2K berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan . Mandat tim yang terdiri d. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(Maret), 116–125.
- Statistik, B. P. (2025). *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)*.

Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

- Statistik, B. P., & Selatan, K. B. (2025). *Membaca Angka, Memahami Realita: Potret Kemiskinan Bengkulu Selatan 2024*. Statistik, Badan Pusat Selatan, Kabupaten Bengkulu.
- Subarsono, A. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sundari, S. (2024). Dampak Kebijakan Publik terhadap Ketimpangan Sosial di Era Digital. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(10), 203–210. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i10.5265>
- Wahono, H. T. T. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(4), 97–110.
- Wahyuni, H., & Fajarini, S. D. (2025). Ruang Ekspresi Diri Di Era Digital (Analisis Peran Tiktok Di Kalangan Mahasiswa Fisip Umb). 6(1), 124–138.
- Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 31(2), 21–42. <https://doi.org/10.55981/jep>.
- Xun Wu, Michael Howlett, M. R. (2017). *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice* (First Edit). Palgrave Macmillan (Springer Nature). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-54675-9>
- Xun Wu, M. H., & Ramesh, and M. (2018). *Policy Capacity and Governance : Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practic* (1st ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54675-9>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research : design and methods*. Los Angeles : SAGE.

Undang-Undang

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2023



L A M P I R A N



Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Informan: Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : 13 April 2026
 - Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
- II. Identitas Informan
 - Nama : Heni Gustin, S.Sos
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : S1
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 1. Bagaimana proses verifikasi dan validasi data dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?
 2. Bagaimana mekanisme penentuan agar data penerima bantuan sosial tepat sasaran?
 3. Bagaimana cara mengatasi jika terdapat ketidaksesuaian data atau data ganda dalam DTSEN?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sistem informasi, dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional?
 2. Apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah mencukupi dalam pelaksanaan DTSEN?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Bagaimana bentuk koordinasi antara dinas Sosial dengan OPD lain dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?
 2. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?

PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Informan: Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : 13 April 2026
 - Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
- II. Identitas Informan
 - Nama : Melza Octavia, S.I.KOM
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : S1
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 1. Bagaimana Proses pengecekan dan verifikasi data masyarakat pada sistem DTSEN atau SIKS-NG ketika terdapat laporan atau pengaduan masyarakat?
 2. Apakah data dalam DTSEN saat ini sudah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan?
 3. Seberapa sering dilakukan pemutakhiran data dalam sistem?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemutakhiran data atau perubahan data DTSEN di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan?
 2. Apakah sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan internet, dan sistem aplikasi SIKS-NG sudah mendukung pelaksanaan pemutakhiran data?
 3. Apakah ada kendala jaringan atau eror sistem saat pengelolaan data?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Bagaimana bentuk koordinasi antara operator Dinas Sosial dengan pemerintah desa atau operator desa dalam proses pemutakhiran DTSEN?
 2. Bagaimana respon masyarakat ketika terjadi perubahan bantuan sosial akibat perubahan data atau desil kesejahteraan dalam DTSEN?

PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Informan: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
 - Tempat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan
- II. Identitas Informan
 - Nama : Mohammad Fathan Romdhoni SST, M.S
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : S2
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 1. Apa peran BPS dalam mendukung implementasi Kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?
 2. Data apa saja yang diberikan BPS untuk mendukung penyusunan DTSEN?
 3. Bagaimana proses sinkronisasi data BPS dengan data yang dimiliki Dinas Sosial?
 4. Apakah terdapat mekanisme verifikasi atau validasi terhadap data yang digunakan dalam DTSEN?
 5. Bagaimana BPS memastikan data sosial ekonomi yang disampaikan tetap akurat dan mutakhir?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Bagaimana mekanisme koordinasi teknis antara BPS dengan Dinas Sosial selama implementasi DTSEN?
 2. Bagaimana kesiapan SDM BPS dalam mendukung implementasi DTSEN?
 3. Kendala teknis apa saja yang pernah dihadapi selama proses pemutakhiran data?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Bagaimana bentuk koordinasi antara BPS dengan Dinas Sosial, Dukcapil, dan OPD lainnya dalam DTSEN?
 2. Bagaimana pembagian tugas masing-masing instansi dalam implementasi DTSEN?
 3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat koordinasi antarinstansi dalam implementasi DTSEN?
 4. Bagaimana mekanisme penyampaian atau pertukaran antara BPS dengan Dinas Sosial dalam mendukung DTSEN?

PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Informan: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
 - Tempat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Identitas Informan
 - Nama : Nasution, SE
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : S1
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 1. Apa peran dukcapil mendukung implementasi DTSEN?
 2. Sejauh mana validitas data kependudukan mempengaruhi ketetapan DTSEN?
 3. Bagaimana mekanisme koordinasi teknis Dukcapil dengan Dinas Sosial?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Bagaimana kesiapan SDM dan sistem informasi Dukcapil dalam mendukung DTSEN?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Bagaimana bentuk koordinasi Dukcapil dengan Dinas Sosial, BPS, dan OPD lainnya?
 2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat koordinasi antarinstansi dalam implementasi DTSEN?
 3. Menurut bapak apakah koordinasi antarinstansi selama implementasi DTSEN sudah berjalan efektif

**PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

Informan: Operator Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : 13 Mei 2026
 - Tempat : Kantor Desa, Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan
- II. Identitas Informan
 - Nama : Esta Susmita S.I.Kom
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : S1
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 - a. Bagaimana proses verifikasi dan validasi data masyarakat dalam pemutakhiran DTSEN di desa ini?
 - b. Apakah sering ditemukan data ganda atau NIK tidak sesuai, bagaimana penanganannya?
 - c. Apakah data masyarakat yang menerima bantuan sosial di desa ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pelatihan terkait DTSEN/SIKS-NG?
 2. Apakah sarana seperti internet dan perangkat komputer sudah mendukung proses pemutakhiran data?
 3. Apakah kendala utama yang dihadapi saat melakukan input atau pemutakhiran DTSEN?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai DTSEN?
 2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan data bantuan setelah menggunakan DTSEN?

PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Informan: Masyarakat KPM

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : 12 Mei 2026
 - Tempat : Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan
- II. Identitas Informan
 - Nama : Eliyusti
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : SMA
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 1. Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait bantuan sosial dari pemerintah yang diterima?
 2. Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan sosial di desa sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?
 3. Apakah pernah ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan sosial mudah dilakukan?
 2. Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa terkait proses pendataan DTSEN?
 3. Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus data bantuan sosial?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau musyawarah terkait DTSEN?
 2. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah terbuka dalam proses pendataan bantuan sosial?

PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Informan: Masyarakat KPM

- I. Waktu
 - Hari/Tanggal : 12 Mei 2026
 - Tempat : Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan
- II. Identitas Informan
 - Nama : Dasni
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : -
- III. Pertanyaan
 - Indikator Kapasitas Analitis
 1. Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait bantuan sosial dari pemerintah yang diterima?
 2. Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan sosial di desa sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?
 3. Apakah pernah ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata?
 - Indikator Kapasitas Operasional
 1. Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan sosial mudah dilakukan?
 2. Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa terkait proses pendataan DTSEN?
 3. Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus data bantuan sosial?
 - Indikator Kapasitas Politik
 1. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau musyawarah terkait DTSEN?
 2. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah terbuka dalam proses pendataan bantuan sosial?

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Heni Gustin, S.Sos
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten
 Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses verifikasi dan validasi data dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?	Prosesnya itu dimulai dari desa, karena setiap desa ada operator desa yang melakukan pemutakhiran/pembaruan data melalui aplikasi SIKS-NG desa. Datanya di isi sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di desa tersebut, baik itu aset rumah, keadaan rumahnya, jenis pekerjaannya, jadi untuk verifikasi dan validasinya itu dimulai dari desa
2	Bagaimana mekanisme penentuan agar data penerima bantuan sosial tepat sasaran?	Kalau untuk mekanismenya itu sebenarnya tidak ada, karena dari pihak dinas sosial itu tidak bisa menetapkan ini tepat sasaran atau tidak, makanya segala mekanisme penentuannya itu dikembalikan ke desa, karena yang tau keadaan ekonominya itu perangkat daerah yang ada di desa tersebut. Dinas Sosial itu sebagai supervisinya saja sebagai untuk perpanjangan tangan dari desa, kecamatan, kabupaten, langsung ke Kemensos dengan syarat-syarat yang ada
3	Bagaimana cara mengatasi jika terdapat ketidaksesuaian data atau data ganda dalam DTSEN?	Melakukan pembaruan data/pemutakhiran data
4	Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sistem informasi, dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional?	Kalau untuk sarana dan prasarannya sudah lengkap ya, komputer/laptop kita ada, dan pastinya jaringan internet, itu harus ada jika sarana dan prasarana itu tidak ada maka tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi data karena sistemnya berbasis aplikasi
5	Apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah mencukupi dalam pelaksanaan DTSEN?	Kalau untuk sumber daya manusia sebenarnya sudah cukup. Di Dinas Sosial sendiri sudah baik karena operator yang menangani DTSEN/SIKS-NG sudah memahami sistem dan alur pemutakhiran data. Namun, di tingkat desa masih ada beberapa operator yang kemampuan penggunaan aplikasinya berbeda-beda, sehingga terkadang masih perlu pendampingan atau bimbingan teknis agar proses

		pemutakhiran data berjalan lebih optimal.
6	Bagaimana bentuk koordinasi antara dinas Sosial dengan OPD lain dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?	Kita berkoordinasi dengan perangkat desa, BPS, BPJS, Dukcapil, BPN, karena DTSEN itu bukan hanya untuk Dinas Sosial, tetapi terkait dengan seluruh OPD tersebut.
7	Bagaimana proses sosialisasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?	Proses sosialisasi dilakukan berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah, kecamatan hingga desa. Di tingkat desa, sosialisasi biasanya dilakukan melakukan musyawarah desa, pertemuan dengan masyarakat, serta penyampaian informasi oleh perangkat desa. Tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya pemutakhiran data dan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.



TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Mohammad Fathan Romdhoni SST, M.S
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa peran BPS dalam mendukung implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?	Peran BPS di daerah sampai saat ini lebih kepada sosialisasi terkait implementasi DTSEN. Di tingkat pusat, BPS menjadi tempat pengelolaan data karena DTSEN merupakan hasil penggabungan beberapa basis data nasional, yaitu DTKS milik Kementerian Sosial, Regsosek dari Bappenas, dan P3KE. Ketiga data tersebut dipadupadankan menjadi satu data tunggal yang memuat kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya masyarakat penerima bantuan sosial. Seluruh kementerian memiliki kewajiban memperbarui data sesuai kewenangannya, kemudian data tersebut dikirimkan kepada BPS untuk diproses menjadi satu basis data nasional. Di tingkat daerah, BPS belum memiliki kewenangan untuk memperbarui data masyarakat secara langsung. Peran yang dijalankan lebih pada komunikasi, koordinasi, dan memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme pembaruan DTSEN. Apabila pemerintah daerah ingin melakukan pembaruan data, BPS membantu memfasilitasi dengan menghubungi BPS pusat agar akses pembaruan dapat dibuka. Proses pembaruan data tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui OPD yang terkait.
2	Data apa saja yang diberikan BPS untuk mendukung penyusunan DTSEN?	DTSEN dibentuk dari penggabungan beberapa sumber data nasional, yaitu DTKS yang berasal dari Kementerian Sosial, Regsosek dari Bappenas, dan P3KE. Data-data tersebut diserahkan kepada BPS untuk dipadupadankan menjadi satu data nasional yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. BPS tidak mengumpulkan seluruh data tersebut secara langsung, tetapi mengolah data yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi statistik, salah satunya berupa desil kesejahteraan masyarakat yang dihitung berdasarkan puluhan variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, data yang digunakan

		dalam DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai sumber data pemerintah yang kemudian diproses oleh BPS menjadi satu sistem data terpadu.
3	Bagaimana proses sinkronisasi data BPS dengan data yang dimiliki Dinas Sosial?	Sinkronisasi data dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan BPS. Pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial, memiliki kewenangan melakukan pembaruan data masyarakat sesuai kondisi di lapangan. Setelah itu, BPS membantu memfasilitasi proses tersebut dengan menghubungi BPS pusat apabila diperlukan pembukaan jalur pembaruan data. BPS daerah tidak melakukan perubahan data secara langsung, melainkan menjadi penghubung agar proses sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan sistem DTSEN di tingkat pusat dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
4	Apakah terdapat mekanisme verifikasi atau validasi terhadap data yang digunakan dalam DTSEN?	Proses validasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan OPD yang memiliki kewenangan terhadap data masyarakat. Setelah data diperbarui, hasilnya akan diteruskan melalui kementerian terkait dan diproses oleh BPS pusat. Penentuan desil kesejahteraan dilakukan berdasarkan data yang telah masuk ke dalam sistem, sehingga BPS daerah tidak memiliki kewenangan menentukan ataupun mengubah hasil tersebut. BPS daerah hanya berperan menyampaikan informasi, memfasilitasi komunikasi, dan memastikan proses pembaruan data berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
5	Bagaimana BPS memastikan data sosial ekonomi yang disampaikan tetap akurat dan mutakhir?	Kualitas statistik sangat bergantung pada kualitas data yang diterima. Apabila data yang dimasukkan tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka hasil statistik, termasuk desil kesejahteraan, juga akan kurang akurat. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah dan OPD yang berwenang. Data yang benar dan selalu diperbarui akan menghasilkan statistik yang lebih tepat, sedangkan data yang tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan memengaruhi hasil pengolahan data dalam DTSEN. Selain itu, kejujuran masyarakat saat proses pendataan juga menjadi faktor penting agar kondisi sosial ekonomi yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.
6	Bagaimana mekanisme koordinasi teknis antara BPS dengan Dinas Sosial selama implementasi DTSEN?	Koordinasi antara BPS dengan Dinas Sosial dilakukan melalui komunikasi dan fasilitasi dalam proses pembaruan data. Apabila pemerintah daerah ingin melakukan pembaruan data masyarakat ke dalam DTSEN, BPS membantu menghubungi BPS pusat agar jalur pembaruan data dapat dibuka.

		Namun, proses pembaruan data tetap dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD yang memiliki kewenangan, termasuk Dinas Sosial. BPS daerah tidak melakukan pembaruan data secara langsung, tetapi memberikan pendampingan, komunikasi, dan sosialisasi mengenai mekanisme yang harus dilalui. Selain itu, BPS juga pernah bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kerja sama tersebut, BPS memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembaruan data, sedangkan petugas PKH yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan masyarakat. Peran tersebut dilakukan agar proses pembaruan data tetap berjalan sesuai pembagian tugas masing-masing instansi.
7	Bagaimana kesiapan SDM BPS dalam mendukung implementasi DTSEN?	BPS memiliki kesiapan dalam mendukung implementasi DTSEN melalui kemampuan memberikan sosialisasi, komunikasi, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, kewenangan BPS daerah masih terbatas karena belum diberikan tugas untuk melakukan pembaruan data masyarakat secara langsung. Tugas tersebut tetap berada pada pemerintah daerah dan OPD terkait, sedangkan BPS berperan sebagai penghubung dengan pemerintah pusat apabila terdapat kebutuhan pembaruan data. BPS juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah agar proses implementasi DTSEN dapat berjalan sesuai ketentuan. Peran tersebut lebih diarahkan pada penyampaian informasi dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme DTSEN sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pembaruan data sesuai prosedur yang berlaku.
8	Kendala teknis apa saja yang pernah dihadapi selama proses pemutakhiran data?	Kendala yang dihadapi bukan hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari proses pembaruan data di lapangan. Masih terdapat OPD yang memiliki data masing-masing, namun belum seluruhnya aktif melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat. Padahal, untuk menghasilkan data yang akurat diperlukan pendataan berbasis <i>By Name By Address</i> (BNBA) sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat segera diketahui dan diperbarui. Selain itu, pembaruan data kependudukan juga menjadi tantangan. Tidak semua masyarakat melaporkan perubahan data seperti perpindahan penduduk, kematian, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi. Akibatnya, data yang digunakan masih menggambarkan kondisi lama. Statistik yang dihasilkan BPS, termasuk desil kesejahteraan, sangat bergantung pada kualitas data

		yang diterima. Apabila data yang masuk tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hasil statistik yang dihasilkan juga akan kurang tepat. Kendala lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang jujur ketika proses pendataan dilakukan karena khawatir status kesejahteraannya berubah dan memengaruhi penerimaan bantuan sosial. Padahal tujuan pembaruan data adalah agar kondisi masyarakat yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
9	Bagaimana bentuk koordinasi antara BPS dengan Dinas Sosial, Dukcapil, dan OPD lainnya dalam DTSEN?	Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah daerah dan OPD yang berkaitan dengan pengelolaan data masyarakat. Setiap instansi memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dinas Sosial menjadi OPD yang paling aktif berkoordinasi dengan BPS mengenai implementasi DTSEN karena berkaitan langsung dengan data penerima bantuan sosial. Sementara itu, Dukcapil memiliki peran dalam menjaga kualitas data kependudukan melalui pembaruan data administrasi penduduk. BPS juga terus menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme pembaruan data DTSEN. Apabila terdapat kebutuhan pembaruan data, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BPS untuk memperoleh fasilitasi kepada BPS pusat. Hingga saat ini, komunikasi yang paling aktif terkait implementasi DTSEN masih dilakukan oleh Dinas Sosial, sedangkan OPD lain diharapkan dapat semakin aktif melakukan pembaruan data sesuai bidang tugasnya masing-masing.
10	Bagaimana pembagian tugas masing-masing instansi dalam implementasi DTSEN?	Pembagian tugas dalam implementasi DTSEN telah disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. BPS pusat bertugas memadupadankan berbagai sumber data nasional dan menghasilkan statistik, termasuk penentuan desil kesejahteraan masyarakat. BPS daerah berperan dalam melakukan komunikasi, koordinasi, sosialisasi, serta memfasilitasi pemerintah daerah apabila akan melakukan pembaruan data. Pemerintah daerah melalui OPD terkait memiliki kewenangan melakukan pembaruan data masyarakat sesuai kondisi di lapangan. Kementerian menjadi pihak yang menyampaikan data kepada BPS sesuai bidang tugasnya masing-masing, sedangkan hasil pengolahan seluruh data tersebut menjadi DTSEN digunakan sebagai dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya penyaluran bantuan sosial.

11	Apa factor yang mendukung dan menghambat koordinasi antarinstansi dalam implementasi DTSEN?	Faktor yang mendukung koordinasi adalah adanya dasar hukum yang mewajibkan penggunaan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya ketentuan tersebut, seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan OPD memiliki kewajiban menggunakan DTSEN sebagai acuan sehingga pelaksanaan implementasinya menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang jelas. Di sisi lain, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Belum semua OPD aktif melakukan pembaruan data masyarakat secara berkala, padahal perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi setiap waktu. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi yang benar ketika dilakukan pendataan. Selama data yang masuk belum diperbarui secara optimal, maka kualitas data dalam DTSEN juga akan memengaruhi hasil statistik dan penentuan desil kesejahteraan masyarakat.
12	Bagaimana mekanisme penyampaian atau pertukaran data antara BPS dengan Dinas Sosial dalam mendukung DTSEN?	Mekanisme penyampaian data dilakukan melalui jalur koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan BPS. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial melakukan pembaruan data masyarakat sesuai hasil pendataan di lapangan. Apabila diperlukan pembaruan pada sistem DTSEN, BPS daerah memfasilitasi dengan menghubungi BPS pusat agar jalur pembaruan data dapat dibuka. Setelah data diperbarui melalui mekanisme yang telah ditentukan, data tersebut menjadi bagian dari sistem DTSEN yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, BPS tidak menerima ataupun mengubah data masyarakat secara langsung di daerah. BPS lebih berperan sebagai penghubung dan fasilitator, sedangkan kewenangan pembaruan data tetap berada pada pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dengan mekanisme tersebut, proses pertukaran data dapat berjalan sesuai pembagian kewenangan masing-masing instansi.

TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Nasution, SE
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
 Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa peran dukcapil dalam mendukung implementasi DTSEN?	Kalau peran Dukcapil itu mencakup masalah data kependudukan karena DTSEN itu berbasis NIK, tanpa NIK berarti data mereka itu tidak bisa disatukan karena seluruh data itu yang dipakai berbasis data NIK, jadi otomatis peran dukcapil itu sangat berperan.
2	Sejauh mana validitas data kependudukan mempengaruhi ketetapan DTSEN?	Kalau validasinya valid ya, kalau kita masalah validasi itu bisa dikatakan kalau data di dinas dukcapil itu jelas valid, karena istilahnya itu data yang kita ambil itu adalah data yang memenuhi syarat yaitu misalnya mereka ingin membuat NIK baru otomatis kalau yang NIK baru itu ada anak yang baru lahir. Dan juga orang dewasa yang belum memiliki NIK kita harus melakukan seleksi ketat yaitu pakai sidik jari, jadi kita telusuri lewat sidik jari itu bahwasanya orang tersebut belum memiliki NIK. Jadi datanya itu memang data yang valid, istilahnya itu bukan data sembarangan
3	Bagaimana mekanisme koordinasi teknis Dukcapil dengan Dinas Sosial?	Mekanisme antara dinas dukcapil dengan dinas sosial itu selalu berkomunikasi masalah data, nah kadang-kadang data antara dinas dukcapil dan dinas sosial itu ada perbedaan. Itu kadang-kadang begitu kita cek hal itu disebabkan karena kesalahan dalam penginputan NIK. Misalnya nama kamu terus di cek ke data dinas sosial ternyata datanya ganda/datanya tidak terdapat ke dalam database, setelah kita cek ternyata ada kesalahan dalam penginputan NIK, pas dicek di dukcapil kita sinkronkan lagi data itu benar, jadi selalu

		berkoordinasi antara dinas dukcapil dengan dinas sosial baik itu dalam istilahnya kesalahan dalam penginputan NIK, kebanyakan disitu.
4	Bagaimana kesiapan SDM dan sistem informasi dukcapil dalam mendukung DTSEN?	Kalo kita dinas dukcapil sumber dayanya yang jelas sudah cukup istilahnya itu karena kita ini kan berbasis data pusat, istilahnya itu bukan lagi data yang disimpan di daerah tetapi data pusat, data pusat itu adalah semua data kita itu dimasukkan ke pusat, nah itulah yang digunakan oleh departemen sosial, departemen keuangan terus yang lain itu kan menggunakan data base pusat dengan catatan mereka harus menjalin kerja sama
5	Bagaimana bentuk koordinasi Dukcapil dengan Dinas Sosial, BPS, dan OPD lainnya?	kalaupun sekarang itu kita sudah baik dari dinas sosial, dinas bps maupun opd yang lain sebenarnya kita sudah menjalankan MoU/Perjanjian itu dalam bentuk kerja sama pemanfaatan data. Pemanfaatan data ini cuman baru istilahnya itu yang sifatnya manual bukan online ya karena kita belum ada yang namanya, karena kalau kita mau memakai data online itu harus punya jaringan. Jaringan itu namanya VVN, VVN itu mahal bukan seperti internet biasa, karena itu jaringan tertutup dan juga pemerintah daerah kita juga belum sanggup untuk itu makanya sementara ini kita kerja sama pemanfaatan data secara manual. Jadi kita berkoordinasi dengan setiap opd, setiap 6 bulan sekali dirjen dukcapil melalui dinas dukcapil mengeluarkan namanya buku Apreda, di buku itu opd lainnya bisa melihat jumlah penduduk bengkulu selatan, laki2, perempuan, pendidikan, umur itu bisa dilihat di buku apreda.
6	Faktor apa yang mendukung dan menghambat koordinasi antarinstansi dalam implementasi dtSEN?	Kalau faktor pendukungnya yang jelas itu karna itu kebutuhan/kepentingan masyarakat. Karena disana banyak kepentingan masyarakat kita membantu untuk keperluan masyarakat makanya kita selalu koordinasi dan konsultasi masalah data yang kita miliki terutama kalau dinas dukcapil itu kita selalu siap untuk koordinasi masalah data ataupun cek masalah data banyak

		istilahnya tu opd yang kesulitan untuk mengecek data jadi mereka langsung ke dinas dukcapil dengan catatan kalo kesulitan kadang2 temuan di masyarakat yaitu NIK ganda, ada yang belum memiliki NIK, ada orang yang sudah pindah itu dicek di dinas dukcapi, selanjutnya kita cek melalui aplikasi, apakah mereka itu masih disini, atau sudah pindah maupun sudah meninggal. Kita itu selalu suport untuk perbaikan data. Kalau penghambatnya itu yang kendalanya itu yaitu kalau ada masyarakat yang belum memiliki NIK. Kalau misalnya opd datang kesini tidak membawa KK atau tidak membawa NIKI nah itu kendala kita untuk menelusuri data orang yang bersangkutan.
7	Menurut bapak apakah koordinasi antarinstansi selama implementasi dtsen sudah berjalan efektif?	Kalau menurut saya sudah efektif dan efisien karena kenapa kita baik dari instansi vertikal itu dari KPU, Pengadilan Agama terus dari instansi internal kebanyakan dari dinas sosial, dinas kesehatan, terus ada lagi bapeda untuk rencana pembangunan 5 tahun itu, melalui seluruh instansi itu selalu berjalan, berkoordinasi dan konsultasi masalah data. Karena masalah data ini cukup rawan/vital karena sekarang ini semuanya berbasis database/data kependudukan, karena kenapa pemerintah pusat mencetuskan bahwa kita itu satu data, satu data itu berarti kita itu menggunakan databasanya adalah database dukcapil makanya kalo sekarang ini tempat seluruh opd itu konsultasinya ke dinas dukcapil, karena database kan berbasis NIK.

TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Melza Octavia S.I.KOM
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses pengecekan dan verifikasi data masyarakat pada sistem DTSEN atau SIKS-NG ketika terdapat laporan atau pengaduan masyarakat?	Biasanya kalau ada masyarakat yang datang melapor, pertama kami minta NIK atau KTP dulu untuk dicek di aplikasi SIKS-NG. Dari situ bisa terlihat data keluarga, status bantuan, desil kesejahteraan, sama apakah ada perubahan data atau tidak. Kalau memang ada data yang tidak sesuai, biasanya kami arahkan dulu ke desa untuk dilakukan usul atau pembaruan data, tergantung masalahnya apa.
2	Apakah data dalam DTSEN saat ini sudah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan?	Kalau dibilang sudah sesuai seluruhnya belum juga, karena kondisi ekonomi masyarakat itu cepat berubah. Kadang ada masyarakat yang dulunya layak menerima bantuan, sekarang sudah berubah kondisinya, atau sebaliknya. Jadi memang tetap perlu pemutakhiran data secara berkala supaya datanya lebih sesuai dengan kondisi di lapangan
3	Seberapa sering dilakukan pemutakhiran data dalam sistem?	Kalau pemutakhiran/pembaruan data itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, menyesuaikan juga ada atau tidak laporan serta usulan yang masuk dari desa dan masyarakat. Jadi kalau ada perubahan data masyarakat, misalnya pindah alamat, meninggal, perubahan ekonomi, atau perubahan anggota keluarga, itu bisa langsung diusulkan untuk diperbarui.
4	Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemutakhiran data atau perubahan data DTSEN di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan?	Pelayanannya biasanya masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial untuk menyampaikan keluhan atau perubahan data. Nanti kami cek dulu di sistem SIKS-NG, kalau memang ada yang perlu diperbaiki biasanya

		kami arahkan ke desa dulu atau operator desa lah, karena penginputan data awal tetap dari desa.
5	Apakah sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan internet, dan sistem aplikasi SIKS-NG sudah mendukung pelaksanaan pemutakhiran data?	Kalau di Dinas Sosial sendiri untuk sarana dan prasarana sudah cukup mendukung, seperti komputer dan internet juga sudah tersedia. Jadi untuk proses pengecekan data dan pelayanan masyarakat sejauh ini berjalan dengan baik. Namun, kalau di tingkat desa masih ada beberapa kendala, terutama di daerah yang cukup pelosok karena jaringan internet kadang kurang stabil. Hal itu terkadang menyebabkan proses penginputan atau pembaruan data menjadi lebih lambat.
6	Apakah ada kendala jaringan atau eror sistem saat pengelolaan data?	Untuk sejauh ini aman tidak ada kendala yang terlalu berarti saat pengelolaan data. Proses pengecekan maupun pemutakhiran data di sistem berjalan dengan baik, seperti kita lihat juga sarana dan prasarana yang ada disini, sudah cukup mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
7	Bagaimana bentuk koordinasi antara operator Dinas Sosial dengan pemerintah desa atau operator desa dalam proses pemutakhiran DTSEN?	Koordinasi dengan pemerintah desa atau operator desa biasanya dilakukan saat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, jadi di situ operator desa diberikan arahan terkait pemutakhiran data dan penggunaan aplikasi SIKS-NG.
8	Bagaimana respon masyarakat ketika terjadi perubahan bantuan sosial akibat perubahan data atau desil kesejahteraan dalam DTSEN?	Kalau untuk respon masyarakat itu beda-beda ya, ada yang bisa memahami setelah dijelaskan, tapi ada juga yang masih bingung atau merasa keberatan kalau bantuannya berubah atau tidak diterima lagi. Biasanya kami jelaskan kalau sekarang data sudah terintegrasi dan penentuan bantuan juga menyesuaikan kondisi data yang ada di sistem.

TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Esta Susmita S.I.Kom
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Operator Desa Suka Negeri, Kec.Air Nipis, Kab.
 Bengkulu Selatan

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses verifikasi dan validasi data masyarakat dalam pemutakhiran DTSEN di desa ini?	Yang pertama itu musyawarah desa dulu, tetapi sekarang terkadang tidak melakukan musyawarah, karena kalo misal ada masyarakat yang minta perbaruan data, baru kita proses perbaruan di aplikasi SIKS-NG, setelah itu kita wawancarainya juga untuk mengetahui apa pekerjaannya, apa saja asetnya, serta foto rumahnya.
2	Apakah sering ditemukan data ganda atau NIK tidak sesuai, bagaimana penanganannya?	Kalo data ganda atau NIK yang tidak sesuai itu ada, tetapi tidak sering, karena ada beberapa masyarakat itu yang melapor.
3	Apakah data masyarakat yang menerima bantuan sosial di desa ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?	Belum, terkadang ada masyarakat yang kaya tetapi masuk ke desil yang rendah, ada yang layak masuk desil 1, desil 2 tetapi masuk desil 6.
4	Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pelatihan terkait DTSEN/SIKS-NG?	Iya pernah satu kali pelatihan bimtek.
5	Apakah sarana seperti internet dan perangkat komputer sudah mendukung proses pemutakhiran data?	Iya sudah mendukung
6	Apakah kendala utama yang dihadapi saat melakukan input atau pemutakhiran DTSEN?	Kendalanya tidak ada, lancar-lancar saja.
7	Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai DTSEN?	Kalau sosialisasi yang secara khusus menjelaskan tentang DTSEN langsung ke masyarakat itu sebenarnya belum ada, karena DTSEN ini juga masih kebijakan yang baru. Biasanya yang disampaikan ke masyarakat itu lebih ke musyawarah terkait bantuan sosial, seperti pedataan atau penerima bantuan. Jadi masyarakat lebih

		banyak mengetahui soal bantuan sosialnya, bukan secara khusus tentang DTSEN
8	Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan data bantuan setelah menggunakan DTSEN?	Respon ,masyarakat itu berbeda-beda, ada yang bisa menerima setelah dijelaskan, terutama kalau memang ada perubahan data atau desil kesejahteraan. Tapi ada juga masyarakat yang masih bingung atau merasa keberatan ketika bantuannya berubah atau tidak lagi diterima. Biasanya kami jelaskan kalau data sekarang sudah menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sistem.



TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Eliyusti
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Masyarakat KPM

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait bantuan sosial dari pemerintah yang diterima?	Kalau diperbarui itu pernah, waktu anak saya naik dari SD ke SMP. Waktu itu ada pembaruan data sekolah supaya bantuan pendidikannya bisa menyesuaikan
2	Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan sosial di desa sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?	Sebenarnya belum, karena masih ada masyarakat yang kurang mampu tapi belum dapat bantuan. Kadang ada juga yang sebenarnya sudah cukup mampu tapi masih menerima bantuan.
3	Apakah pernah ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata?	Ada, masih ada beberapa warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, apalagi yang sudah lanjut usia atau kurang mampu, tapi belum masuk data bantuan
4	Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan sosial mudah dilakukan?	Iya mudah
5	Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa terkait proses pendataan DTSEN?	Kalau penjelasan khusus tentang DTSEN itu belum pernah. Biasanya yang dijelaskan lebih ke bagaimana proses pengurusan bantuan sembako/BPNT, PKH dengan BPJS
6	Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus data bantuan sosial?	Sejauh ini tidak ada kendalanya
7	Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau musyawarah terkait DTSEN?	Kalau musyawarah tentang bantuan sosial pernah, biasanya di desa ada pertemuan. Tapi kalau sosialisasi yang khusus menjelaskan DTSEN secara langsung sepertinya belum pernah
8	Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah terbuka dalam proses pendataan bantuan sosial?	Iya sudah lumayan terbuka, karena biasanya ada musyawarah dan masyarakat juga bisa menyampaikan kalau ada data yang perlu diperbaiki.

		Tapi kadang masih ada juga masyarakat yang kurang paham prosesnya.
--	--	--



TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Dasni
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Masyarakat KPM

II. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah data bapak/ibu pernah diperbaiki terkait bantuan sosial dari pemerintah yang diterima?	Pernah, waktu itu ada perubahan data keluarga, jadi diminta melengkapi berkas lagi ke desa. Setelah itu dibantu diurus supaya bisa dapat bantuan.
2	Menurut bapak/ibu apakah pendataan bantuan sosial di desa sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?	Kalau menurut saya belum sepenuhnya tepat, karena masih ada warga yang ekonominya susah tapi belum dapat bantuan. Kadang masyarakat juga suka bertanya-tanya kenapa ada yang dapat, ada yang tidak
3	Apakah pernah ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata?	Ada, terutama orang yang sudah tua atau janda yang menurut saya perlu dapat bantuan, tapi belum masuk penerima bantuan. Mungkin datanya belum diperbarui.
4	Apakah proses pengurusan atau perubahan bantuan sosial mudah dilakukan?	Kalau mengurus perubahan data itu harus sabar, karena tidak langsung. Biasanya lapor dulu ke desa, nanti diproses lagi, jadi memang perlu waktu.
5	Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa terkait proses pendataan DTSEN?	Belum pernah, dan kurang tahu juga.
6	Apakah pernah mengalami kendala saat mengurus data bantuan sosial?	Kalau saya sendiri sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Waktu ada perubahan data juga dibantu dari pihak desa, jadi tinggal mengikuti proses yang ada.
7	Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau musyawarah terkait DTSEN?	Iya pernah, biasanya membahas bantuan sosial. Tapi kalau khusus tentang DTSEN saya kurang tahu
8	Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah terbuka dalam proses pendataan bantuan sosial?	Iya sudah cukup terbuka, karena kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan keluhan masih bisa datang ke kantor desa.

SURAT PENELITIAN

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765 ● fisip.umb.ac.id ☎ (0736) 26161 ● fisipol@umb.ac.id		
Nomor	: 130-SI/DF.7/IL3.AU/C/2026	Bengkulu, 2 April 2026
Lamp	: 1 berkas	
Perihal	: Izin Penelitian	
Kepada Yth	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan di Tempat	
<i>Assalammu'alaikum Wr. Wb.</i> Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami : Nama : Loli Noveli NPM : 2263201031 Program Studi : Administrasi Publik Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan" penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 13 April – 13 Mei 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. <i>Wassalammu'alaikum Wr. Wb.</i>		
 a/n Dekan, Wakil Dekan I Rosidin, M. Si NP. 19820112 200904 1 080		
 umb.ac.id  humas@umb.ac.id  0822-3546-1991	 um.bengkulu  um.bengkulu  um.Bengkulu	 um.bengkulu  umb.tv  Radio Izzirah FM 104.3 MHz

DOKUMENTASI



Dokumentasi koordinasi penelitian bersama Bapak Hen Yepi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Ibu Heni Gustin Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Melza Octavia Operator
Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan



Melakukan proses wawancara dengan Ibu Esta Susmita Operator Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan



Melakukan proses wawancara dengan Ibu Elyusti masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan



Melakukan proses wawancara dengan Ibu Dasni, Masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT di Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan. Bapak Mohammad Fathan Romdhoni SST, M.S



Dokumentasi bersama bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bapak Kastilon, S.Sos.



Melakukan Proses wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bapak Nasution, SE.